

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan ridho-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja/Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT) Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana

Penyusunan Rencana Kerja/Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT) adalah merupakan penjabaran DPA SKPD dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023.

Rencana Kerja/Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT) berisi materi rencana strategis, yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan memperhitungkan potensi, tantangan, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja/Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT) tahun 2023 ini diharapkan pelaksanaan teknis kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat lebih terencana, terpola dan terpadu.

Mataram, Juni 2024

Kepala Dinas,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat

I Gede Putu Aryadi, S.Sos.MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19670320 198903 1013

IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita Bangsa dan Negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sitem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban menyusun Rencana Kerja/Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT) Tahun 2024 sebagai landasan dan pedoman operasional pelaksanaan kegiatan program-program tahun 2024.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	5
BAB III TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	39
BAB IV RENCANA KERJADAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	41
BAB V DANA PENUTUP	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Maka setiap SKPD wajib merumuskan rencana setrategis dengan mengacu pada RPJMD dan dengan mempertimbangkan kondisi dan isu strategis masing-masing wilayah. Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman perencanaan 5 (lima) tahun yang mempunyai fungsi sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan, dan sebagai acuan dan pedoman penyusunan RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah sebagai dokumen operasional tahunan di Disnakertrans Prov. NTB. Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan mewujudkan tujuan pembangunan.

Rencana Kerja/Rencana Kerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024. Untuk mendapatkan keselarasan antara RENJA/RKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024. Sehubungan dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 yang mengacu kepada Rancangan awal RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023, Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 dan dokumen perencanaan lainnya.

Untuk penjabaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, maka dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi dan berkesinambungan proses penyusunan perencanaan pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan, maka diperlukan RENJA/RKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan tahun ke-1 RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 dan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026.

RENJA SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Arah kebijakan, Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RENJA/RKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan visi dan misi jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam dokumen RENSTRA Tahun 2024-2026.

RENJA/RKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 juga merupakan sebagai bahan untuk penyusunan RKPD, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS), penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RKA) dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024, serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026, RENSTRA Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026, RKP Tahun 2023, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 dan dokumen lain yang terkait yang pada akhirnya menjadi muara penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun yang bersangkutan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
11. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dan Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD, RPJMD Dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
16. Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan sebagai acuan dan alat koordinasi

dan evaluasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 1(satu) tahun.

Tujuannya adalah:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan sebagai Kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD Tahun Anggaran 2024.
2. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dengan RKPD Provinsi NTB Tahun 2024;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi urusan melalui capaian target kinerja program dan kegiatan;
4. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan pelayanan publik dengan pola Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Renja merupakan telaah terhadap hasil evaluasi pencapaian target kinerja program/kegiatan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja, setelah selesai pelaksanaan dilakukan evaluasi/*review* agar pelaksanaan tahun mendatang dapat diidentifikasi realisasi program/kegiatan yang memenuhi atau melampaui target dan yang tidak memenuhi target serta kendala - kendala yang dihadapi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB telah menetapkan Perjanjian Kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka dibuat Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Gubernur NTB dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Target dan Realisasi Sasaran Staregis, Indikator Kinerja
Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	Persentase Penyerapan Angkatan Kerja	96,81	97,11	100,31
2	Mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis/konduusif	Presentase Perusahaan yang harmonis/konduusif	99,06	99,25	100,19
3.	Terwujudnya transmigran yang sejahtera dan mandiri	Persentase transmigran yang sejahtera dan mandiri	48,00	48,60	101,25

Dari Tabel 2.1, Sasaran Strategis 1 (satu) Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat melebihi target dari target 96.81 persen dengan realisasi 97,11 persen, capaian ini sejalan dengan turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NTB. Hal ini menggambarkan

meningkatnya penempatan tenaga kerja baik pada sektor formal maupun informal serta kompetensi tenaga kerja yang dilatih sudah sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dunia industri.

Pada Sasaran Strategis 2 (dua) Dalam rangka Mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis/kondusif dapat diukur dengan indikator persentase perusahaan yang harmonis/kondusif. Pada tahun 2022 persentase perusahaan yang harmonis/kondusif ditargetkan sebesar 99,06 persen dengan realisasi 99,25 persen, capaian sudah melebihi target yang sudah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tahun 2022 Disnakertrans Prov. NTB (berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006), terdapat program prioritas dalam rangka mencapai tujuan perangkat daerah yaitu Tercapainya Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Program tersebut adalah Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, dengan realisasinya pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2022

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD s.d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2022			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=5+7
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Porsentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	90	%	300.351.716	63	35.481.400	100	37.264.900	100	37.026.400	100	99,35	100	72.507.800	200	29,63
1.1	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen PTKD Makro yang di hasilkan	1	dokumen	244.705.400,00	1	35.481.400	1	37.264.900	1	37.026.400	100	99,35	2	72.507.800	200	29.63
1.2	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro yang di hasilkan	1	dokumen	55.646.316,17	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	18	%	3.481.991.780	17,89	340.123.600	17	1.395.498.920	17,49	1.379.052.451	102,88	98,82	35,38	1.719.176.051	196,55	49,37
2.1	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (Induk)	Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	750	Orang	1.092.070.447	18	139.264.200	300	28.892.000	300	28.480.000	100	98,57	318	167.744.200	42,4	15,36

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD s.d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja RKP SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2022			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=5+7		10=(9/4)*100	
2.2	Sub kegiatan Koordinasi Lintas lembaga dan Kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah dokumen hasil identifikasi kebutuhan pelatihan dan pemagangan	2	Dokumen	105.373.987,26	0	0	2	550.025.300	2	549.634.500	100	99,92	2	549.634.500	100	521,60
2.3.	Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK Yang Disurvei dan dinilai	100	Lembaga	147.454.000	25	23.434.000	10	16.636.840	10	16.596.800	100	99,75	35	40.030.800	35	27,14
2.4.	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (BLK)	Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	384	orang	2.044.288.965	32	160.937.800	128	740.752.300	128	725.161.151	100	97,90	160	886.098.951	41,66	43,34
2.5	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan (forma/ informal	55	OT	92.804.380	15	16.487.600	20	59.192.480	20	59.180.000	100	99,97	35	75.667.600	63,63	81,53

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD s.d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2022			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=5+7
3	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan %	57.48	%	3.391.251.944	47.58	614.163.200	51,09	716.196.200	52,11	709.127.993	101,99	99.01	99,69	1.323.291.193	173,43	39,02
3.1.	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota	jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme AKAD/ AKL	480	Orang	910.699.800	40	85.215.600	160	20.186.500	160	19.826.400	100	98,21	200	105.042.000	41,66	11,53
3.2.	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	5.250	Orang	388.974.000	0	49.460.500	1.000	13.222.000	588	13.222.000	58.8	100	588	62.682.500	11,20	16,11
3.3.	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	Jumlah PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan.	76.010	Orang	1.995.499.514	1.629	477.418.900	11.830	676.099.000	18.145	669.390.893	153,38	99.00	19,774	1.146.809.793	26,01	57,45
3.4	Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu)Daerah Provinsi	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan	95	orang	96.078.630	20	2.068.200	91	6.688.700	91	6.688.700	100	100	111	8.756.900	116,84	9,11

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD s.d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2022			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=5+7		10=(9/4)*100	
4	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.	Besaran sengketa pengusaha pekerja %	23	%	1.025.630.908	15.94	186.002.400	22	887.964.800	50,12	887.674.500	231,73	99,96	66.06	1.073.676.900	287.21	104,68
4.1	Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu Daerah Provinsi]	Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	270	Perusahaan	743.997.600	60	130.939.200	19	137.507.400	19	137.437.600	100	99,94	118,94	268.376.800	44.05	36,07
4.2	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan	11	%	281.633.308	11	55.063.200	11	750.457.400	11	750.236.900	100	99,97	22	805.300.100	200	285,93

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD s.d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2022			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=5+7		10=(9/4)*100	
	Kabupaten /Kota (UMSK)																
5.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan.	Besaran pemeriksaan Perusahaan	23	%	3.466.483.655	21.49	725.768.600	22	746.708.860	23,40	679.653.080	106,36	91,02	1.152	1.405.421.680	5,08	40,54
5.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	3.175	Perusahaan	3.466.483.655	367	725.768.600	797	746.708.860	785	679.653.080	98,49	91,02	1.152	1.405.421.680	36,28	40,54
6	Program Perencanaan Kawasan transmigrasi	Persentase Kawasan baru transmigrasi	100	%	300.462.180	100	61.462.840	100	29.765.920	100	29.568.120	100	99,34	200	91.030.960	200	30,29
6.1	Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen NKSAD.	1	dokumen	300.462.180	1	61.462.840	1	29.765.920	1	29.568.120	100	99,34	2	91.030.960	200	30,29
7	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	persentase kawasan transmigrasi yang dibangun	60	KK	154.134.760,08	0	0	100	19.631.500	100	19.571.500	100	99,69	100	19.571.500	166,66	12,69

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD s.d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2022			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=5+7		10=(9/4)*100	
7.1	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal	Jumlah transmigran yang ditempatkan dalam 1 provinsi	60	KK	154.134.760,08	0	0	20	19.631.500	20	19.571.500	100	99,69	20	19.571.500	33,33	12,69
8	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase satuan permukiman yang mandiri	100	%	229.134.751	75	51.704.430	75	26.179.900	75	26.124.900	100	99,78	150	77.829.330	150	33,96
8.1	Kegiatan Pengembangan satuan Pemukiman pada tahap pemantapan	Jumlah peserta Bimtek	60	orang	229.134.751	30	51.704.430	60	26.179.900	60	26.124.900	100	99,78	90	77.829.330	150	33,96

Adanya Revisi Renstra Disnakertrans Prov NTB Tahun 2019-2023, Program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka dibuat Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Gubernur NTB dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

*Tabel 2.3.
Target dan Realisasi sasaran staregis, indikator kinerja
Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2022*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	Persentase Penyerapan Angkatan Kerja	96,81	97,11
2	Mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis/kondusif	Presentase Perusahaan yang harmonis/kondusif	99,06	99,25
3	Terwujudnya transmigran yang sejahtera dan mandiri	Persentase transmigran yang sejahtera dan mandiri	48,00	48,60

Sesuai dengan Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 penyusunan program/kegiatan mengalami perubahan, sebelumnya Permendagri 13 berubah menjadi Permendagri 90. Dalam mencapai tujuan perangkat daerah, Disnakertrans di dukung oleh 8 program prioritas antara lain : Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Program Hubungan Industrial dan Program Pengawasan Ketenagakerjaan. Berikut Rencana Program dan Kegiatan seperti pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Perkiraan Hasil Pelaksanaan Renja dan Realisasi Anggaran 2023

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja hsl Prog. & Keluaran Keg. SKPD s.d Thn II (2022)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2023			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=5+7
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Porsentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	90	%	300.351.716	100	37.026.400	100	70.975.200	100	70.975.200	100	100	200	108.001.600	222,22	35,95
1.1	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen PTKD Makro yang di hasilkan	1	dokumen	244.705.400,00	1	37.026.400	1	70.975.200	1	70.975.200	100	100	2	108.001.600	200	44,13
1.2	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro yang di hasilkan	1	dokumen	55.646.316,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	18	%	3.481.991.780	17,49	1.379.052.451	18	628.276.660	18	628.276.660	100	100	35,49	2.007.329.111	197,16	57,65
2.1	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	750	Orang	1.092.070.447	300	28.480.000	300	169.999.940	300	169.999.940	100	100	600	198.479.940	80	18,17

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja hsl Prog. & Keluaran Keg. SKPD s.d Thn II (2022)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2023			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=5+7		10=(9/4)*100	
2.2.	Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan kerja sama dengan sector swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah peralatan bantuan usaha pelatihan yang di berikan	6	Lembaga	105.373.987	18	549.634.500	10	239.990.000	10	239.990.000	100	100	28	789.624.500	466,66	749,35
2.3.	Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK Yang Disurvei dan dinilai	100	Lembaga	147.454.000	10	16.596.800	100	15.000.140	100	15.000.140	100	100	110	31.596.940	110	21,42
2.4.	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (BLK)	Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	384	orang	2.044.288.965	128	725.161.151	160	199.999.780	160	199.999.780	100	100	288	925.160.931	75	45,25
2.5	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan (forma/ informal	55	OT	92.804.380	128	59.180.000	20	3.286.800	20	3.286.800	100	100	148	62.466.800	269	67,31

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja hsl Prog. & Keluaran Keg. SKPD s.d Thn II (2022)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2023			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=5+7		10=(9/4)*100	
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.	57,48	%	3.391.251.944	52,11	709.127.993	57,48	339.379.500	57,48	339.379.500	100	100	109,59	1.048.507.493	190,65	30,91
3.1..	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota	jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme AKAD/ AKL	480	Orang	910.699.800	160	19.826.400	30	19.089.000	30	19.089.000	100	100	190	38.915.400	39,58	4,27
3.2.	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	5.250	Orang	388.974.000	588	13.222.000	2.000	14.084.300	2.000	14.084.300	100	100	2.588	27.306.300	49,29	7,02
3.3.	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	Jumlah PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan.	26.438	Orang	1.995.499.514	18.145	669.390.893	29.140	299.513.200	29.140	299.513.200	100	100	47.285	968.904.093	178,85	48,55
3.4.	Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Dalam I (Satu)Daerah Provinsi	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan	95	orang	96.078.630	91	6.688.700	95	6.693.000	95	6.693.000	100	100	186	13.381.700	195,78	13,92

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja hsl Prog. & Keluaran Keg. SKPD s.d Thn II (2022)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2023			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=5+7		10=(9/4)*100	
4.	Program Hubungan Industrial	persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	23	%	1.170.630.908	50,12	887.674.500	23	1.331.005.100	23	1.331.005.100	100	100	73,12	2.218.679.600	317,9	189,52
4.1	Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi]	Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	270	Perusahaan	743.997.600	19	137.437.600	19	114.105.100	19	114.105.100	100	100	38	251.542.700	14,07	33,80
4.2	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan	11	Dokumen	426.633.308	11	750.236.900	11	1.216.900.000	11	1.216.900.000	100	100	22	1.967.136.900	200	461,0

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja hsl Prog. & Keluaran Keg. SKPD s.d Thn II (2022)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2023			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=5+7		10=(9/4)*100	
	/Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMSK)																
5.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	23	%	3.466.483.655	23,40	679.653.080	23	311.658.060	23	311.658.060	100	100	46,40	991.311.140	201	28.60
5.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	3.175	Perusahaan	3.466.483.655	785	679.653.080	195	311.658.060	195	311.658.060	100	100	980	991.311.140	30,86	28,60
6	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	persentase Kawasan Baru Transmigrasi	100	%	300.462.182,82	100	29.568.120	100	84.960.500	100	84.960.500	100	100	200	114.528.620	200	38,12
6.1	Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen NKSAD.	1	Dokumen	300.462.182,82	1	29.568.120	100	84.960.500	100	84.960.500	100	100	200	114.528.620	20	38,12

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja hsl Prog. & Keluaran Keg. SKPD s.d Thn II (2022)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2023			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=5+7		10=(9/4)*100	
7	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	persentase kawasan transmigrasi yang dibangun	100	%	154.134.760,08	100	19.571.500	100	18.959.000	100	18.959.000	100	100	200	38.530.500	200	25,00
7.1.	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah transmigran yang ditempatkan dalam 1 provinsi	60	KK	154.134.760,08	20	19.571.500	20	18.959.000	20	18.959.000	100	100	40	38.530.500	66,66	25,00
8	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Cakupan kawasan transmigrasi yang dikembangkan	100	%	229.134.751	75	26.124.900	100	18.959.000	100	18.959.000	100	100	175	45.083.900	175	19,67
8.1.	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Pemantapan	Jumlah peserta Bimtek	60	orang	229.134.751	60	26.124.900	60	18.959.000	60	18.959.000	100	100	120	45.083.900	200	19,67

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan PD berupa kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD dengan target kinerja dan dampak atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan PD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, maka perlu disusun strategi dan arah kebijakan organisasi yang jelas dan terukur. Adapun strategi dan arah kebijakan organisasi dapat dilihat pada Tabel 2.5.

*Tabel 2.5.
Strategi Dan Arah Kebijakan*

<p>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB memiliki tugas dan fungsi mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB tahun 2024-2026 yaitu pada Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas manusia NTB yang Kompetitif, Unggul, Andal, dan Takwa (KUAT) dengan serta salah satu sasarnya adalah Meningkatnya kualitas Kompetensi Sumber Daya Manusia.</p> <p>Selain Tujuan 2, Tujuan dan sasaran Renstra Disnakertrasn Prov. NTB tahun 2024-2026 juga mendukung Tujuan 4 : TERWUJUDNYA KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MANDIRI dengan salah satu sasarnya adalah Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik).</p> <p>Ketiga, tujuan dan sasaran Renstra Disnakertrans Prov. NTB tahun 2024-2026 juga mendukung Tujuan V RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 : TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH dengan salah satu sasaran Meningkatnya kemandirian fiskal daerah.</p>
--

Strategi Dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
A.	Meningkatnya pemberdayaan dan pendayagunaan angkatan kerja	Meningkatnya pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan Tenaga Kerja yang sesuai kebutuhan Pembangunan	Optimalisasi/ peningkatan daya saing tenaga kerja, penciptaan kesempatan kerja formal dan informal serta penempatan tenaga kerja yang berkelanjutan baik di dalam dan luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan perencanaan t kerja be kebutuhan kerja - standarisasi sertifikasi kompetensi - Optimalisasi penempatan t kerja melalui AKAD dan AKA - Penciptaan wirausaha melalui pemberdayaan tenaga kerja
		Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Optimalisasi pengawasan ketenagakerjaan serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengawasan kerja dan K3 - Peningkatan s hubungan indu - Jaminan ketenagakerjaa - Peningkatan pengawasan terhadap t kerja/ CPMI
		Meningkatnya kemandirian transmigran	Pembinaan transmigran	Pemberdayaan transmigran
B.	Terwujudnya Kawasan transmigrasi mandiri yang	Meningkatnya pengembangan satuan permukiman transmigrasi	Pembangunan kawasan transmigrasi	Pembangunan pengembangan s permukiman kawasan transn yang berkelanjutan
C.	Peningkatan penerimaan retribusi	Meningkatnya penerimaan retribusi melalui pelayanan K3 dan Rencana Penggunaan TKA	Optimalisasi pelayanan K3 dan penggunaan TKA	Peningkatan peml dan pengawasa perusahaan

Dalam RPJMD Pemerintah Provinsi NTB 2019 – 2023, Indikator Kinerja Daerah (IKD) dari aspek kesejahteraan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB adalah:

1. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang diikhtiarkan semakin menurun. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatannya dapat dilakukan dengan penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas sektor-sektor ekonomi yang dikelola masyarakat sehingga diharapkan terjadi penurunan tingkat pengangguran.

Pada Tahun 2021, target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Nusa Tenggara Barat sebesar **3,30 persen**, dan realisasi TPT sebesar **3,01 persen**, sedangkan Tahun 2022, target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Nusa Tenggara Barat sebesar **3,19 persen**, dan realisasi TPT sebesar **2,89 persen (realisasi BPS Prov. NTB Per Agustus 2022)**.

2. Persentase Cakupan Penempatan Transmigran terus dikembangkan demi mencapai pemerataan jumlah penduduk dan mengurangi kemiskinan. Program ketransmigrasian menjadi penting untuk dilaksanakan karena berperan dalam mengembangkan kawasan yang semula tidak produktif menjadi lebih berkembang dikarenakan banyak kegiatan-kegiatan produktifitas yang bisa dilakukan oleh warga transmigran. Transmigrasi juga berperan secara tidak langsung dalam penyerapan tenaga kerja pada sektor informal khususnya di pertanian dan perkebunan. Pada Tahun 2021, target Cakupan Penempatan Transmigran di Nusa Tenggara Barat sebesar **90 persen**, dan realisasi sebesar **84,19 persen** sedangkan Tahun 2022, target Cakupan Penempatan Transmigran di Nusa Tenggara Barat sebesar **95 persen**, dan realisasi sebesar **84,19 persen**.

*Tabel 2.6.
Tabel capaian RPJMD Disnakertrans Prov. NTB 2019-2023.*

Indikator	Sat.	Kondisi Awal RPJMD 2018	2019		2020		2021		2022		2022		Kondisi Akhir RPJMD 2023
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,72	3,39	3,42	3,35	4,22	3,30	3,01	3,19	2,89	3,17	0	3,17
Cakupan Penempatan	%	75	80	84,19	85	84,19	90	84,19	95	84,19	100	0	100

Transmigran													
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ket :

**) Tingkat Pengangguran Terbuka kondisi Agustus 2022 (data BPS Prov. NTB)*

Pada Bulan Agustus tahun 2022 TPT mengalami penurunan sebesar 0,12 persen poin, dibandingkan Agustus tahun 2021 Apabila dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, TPT pada Agustus 2022 memiliki pola yang hampir sama dengan Agustus 2021. Pada Agustus 2022, TPT dari tamatan SMA Kejuruan masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 6,99 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 1,23 persen. Dibandingkan Agustus 2021, kategori pendidikan yang mengalami penurunan TPT adalah untuk tamatan SMA Kejuruan yang turun sebesar 0,80 persen poin, diikuti dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah turun sebesar 0,29 persen poin, dan tamatan Universitas yang turun sebesar 0,06 persen poin.

Berdasarkan data BPS Prov. NTB, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 2,80 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 59,29 ribu orang dibanding Agustus 2021. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 0,36 persen poin.

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2022, distribusi penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SMP ke bawah yaitu sebesar 66,21 persen. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas sebesar 12,36 persen.

Penduduk yang bekerja sebanyak 2,72 juta orang, meningkat sebanyak 60,95 ribu orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk bekerja terbesar adalah Sektor Pertanian (1,96 persen poin), Perdagangan Besar dan Eceran (0,81 persen poin), dan Jasa Lainnya (0,40 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Industri Pengolahan (1,99 persen poin), Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (0,73 persen poin), dan Transportasi dan Pergudangan (0,54 persen poin).

Sebagian besar penduduk yang bekerja merupakan pekerja penuh (61,40 persen). Sementara pekerja paruh waktu sebesar 25,30 persen dan setengah penganggur 13,30 persen.

Untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan rendahnya kualitas tenaga kerja

telah dilakukan berbagai upaya dari pihak pemerintah, swasta dan berbagai elemen masyarakat.

Peran pemerintah dan swasta dalam penciptaan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran serta meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dilakukan melalui program dan berbagai kegiatan pelatihan berbasis kompetensi baik yang dilaksanakan oleh BLK, LLK maupun LPK Swasta.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah produktivitas tenaga kerja yang masih rendah dan pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga berdampak terjadinya pengangguran. Sehingga perlu merumuskan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja serta mengupayakan peningkatan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja sehingga tercipta kesempatan kerja yang luas, kondusif serta mendukung penyiapan tenaga kerja yang mandiri, berdaya saing serta sejahtera.

Untuk mewujudkan hal tersebut telah dilakukan upaya peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja dan pelayanan ketenagakerjaan. Untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja diupayakan melalui peningkatan perlindungan tenaga kerja. Melalui berbagai program dan kebijakan tersebut diharapkan tenaga kerja yang terserap makin meningkat, sehingga tingkat pengangguran makin berkurang.

Salah satu cara untuk menangani pengangguran adalah dengan bekerja sama dengan pihak - pihak lain untuk pelatihan, penempatan dan pemagangan tenaga kerja. Selain itu juga dengan menambah pelatihan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan anggaran dari APBD, APBN maupun sumber lain.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Isu-isu strategis yang menjadi tantangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah :

No.	Isu Strategis	Permasalahan
1.	Belum adanya <i>link and match</i> ketenagakerjaan	a) Angkatan kerja di NTB masih didominasi oleh pendidikan SMP kebawah
		b) Belum adanya analisis pasar kerja dari sektor ketenagakerjaan
		c) Belum optimalnya keterlibatan/ kolaborasi antara

		dunia pendidikan (Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan Vokasi SMK, BLK/ LLK) dengan DUDI dalam menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan kerja yang sesuai dengan kesempatan kerja yang dibutuhkan saat ini
		d) Pemerintah belum siap dalam menghadapi transformasi teknologi 4.0, dimana banyak jenis jabatan yang sudah terganti oleh teknologi, namun di sisi lain banyak muncul jabatan baru.
		e) Sistem informasi/ ekosistem pasar kerja belum optimal
		f) Kesempatan kerja yang ditawarkan belum sesuai angkatan yang tersedia
2.	Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja	a) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan serta pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
		b) Belum optimalnya pengawasan & perlindungan kepada CPMI
		c) Pembinaan sarana perangkat hubungan industrial (PP,PKB, LKS Bipartit, SP/SB) di perusahaan belum maksimal
		d) Proporsi kepersertaan tenaga kerja Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih rendah
3.	Belum optimalnya pengelolaan kawasan transmigrasi dari segi perencanaan, penempatan hingga pembinaan	a) proporsi transmigran yang belum sejahtera masih rendah
		b) Sertifikat hak milik transmigran yang belum tuntas
		c) Kondisi sarana dan prasarana yang perlu mendapat perhatian (SAB, Jalan poros, fasilitas

		umum, dll)
		d) Masih ada transmigran yang belum memiliki rumah layak huni
		e) Pelatihan peningkatan kapasitas yang minim
		f) Bantuan sarana alat pertanian, bibit serta akses permodalan yang minim

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil telaahan terhadap RKPD Tahun 2024 adalah sebagaimana Tabel 2.7.

*Tabel 2.7.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD*

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
				Sat.	Target					Sat.	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Provinsi NTB	Porsentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persen	100	235.000.000	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Provinsi NTB	Porsentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persen	100	235.000.000	
1.1	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang di hasilkan	dokumen	2	235.000.000	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang di hasilkan	dokumen	2	235.000.000	
1.1.1.	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen PTKD Makro yang di hasilkan	Dokumen	10	150.000.000	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen PTKD Makro yang di hasilkan	Dokumen	10	150.000.000	
1.1.2	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro yang dihasilkan	Orang	50	85.000.000	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan pemagangan	Orang	50	85.000.000	
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Provinsi NTB	Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%	14,85	1.343.000.000	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Provinsi NTB	Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%	14,85	1.343.000.000	
2.1	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Provinsi NTB	Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	Orang	396	1.213.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Provinsi NTB	Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	Orang	396	1.213.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
				Sat.	Target					Sat.	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1.1	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [BID. LATTAS]	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Luar Negeri	Orang	300	250.000.000	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [BID. LATTAS]	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Luar Negeri	Orang	300	250.000.000	
2.1.2	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [BLK]	Provinsi NTB	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	96	535.000.000	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [BLK]	Provinsi NTB	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	96	535.000.000	
2.1.3.	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga Dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana Dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja [BID. LATTAS]	Provinsi NTB	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	lembaga	10	300.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga Dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana Dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja [BID. LATTAS]	Provinsi NTB	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	lembaga	10	300.000.000	
2.1.4	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Provinsi NTB	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	11	128.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Provinsi NTB	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	11	128.000.000	
2.2.	Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Provinsi NTB	Jumlah LPK Yang Disurvei dan dinilai	LPK	5	50.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Provinsi NTB	Jumlah LPK Yang Disurvei dan dinilai	LPK	5	50.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
				Sat.	Target					Sat.	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2.1	Sub Kegiatan Survei Dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja [BID. LATTAS].	Provinsi NTB	Jumlah LPK yang di Akreditasi	LPK	5	50.000.000	Sub Kegiatan Survei Dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja [BID. LATTAS].	Provinsi NTB	Jumlah LPK yang di Akreditasi	LPK	5	50.000.000	
2.3.	Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	5	45.000.000	Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	5	45.000.000	
2.3.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	5	45.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	5	45.000.000	
2.4	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	1	35.000.000	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	1	35.000.000	
2.4.1	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	1	35.000.000	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	1	35.000.000	
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Provinsi NTB	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.	%	44,71	1.310.000.000	Program Penempatan Tenaga Kerja	Provinsi NTB	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.	%	44,71	1.310.000.000	
3.1	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota	Provinsi NTB	jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui AKAD/ AKL	Orang	2.800	550.000.000	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota	Provinsi NTB	jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui AKAD/ AKL	Orang	2.800	550.000.000	
3.1.1	Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja [BID. PENEMPATAN]Kerja Lokal) [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Orang	2500	50.000.000	Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja [BID. PENEMPATAN]Kerja Lokal) [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Orang	2500	50.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
				Sat.	Target					Sat.	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.1.2	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	100	100.000.000	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	100	100.000.000	
3.1.3	Sub Kegiatan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah Dan AKL Antar Kerja Lokal) [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Orang	100	100.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah Dan AKL Antar Kerja Lokal) [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Orang	100	100.000.000	
3.1.4	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	100	300.000.000	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	100	300.000.000	
3.2	Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi NTB	Jumlah izin yang diterbitkan	lembaga	35	50.000.000	Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi NTB	Jumlah izin yang diterbitkan	lembaga	35	50.000.000	
3.2.1	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	lembaga	35	50.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	lembaga	35	50.000.000	
3.3	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	Orang	2.500	200.000.000	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	Orang	2.500	200.000.000	
3.3.1	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online [BID.	Provinsi NTB	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	dokumen	1	25.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi	Provinsi NTB	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	dokumen	1	25.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
				Sat.	Target					Sat.	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PENEMPATAN]						Pasar Kerja Online [BID. PENEMPATAN]						
3.3.2	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	5.000	25.000.000	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	5.000	25.000.000	
3.3.3	Sub Kegiatan Job Fair /Buruh Kerja [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	1.000	150.000.000	Sub Kegiatan Job Fair /Buruh Kerja [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	1.000	150.000.000	
3.4	Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah PMI Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan.	Orang	24.453	475.000.000	Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah PMI Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan.	Orang	24.453	475.000.000	
3.4.1.	Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan Dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	150	150.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan Dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	150	150.000.000	
3.4.2.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	Perusahaan	25	50.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	Perusahaan	25	50.000.000	
3.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	Orang	21.500	25.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	Orang	21.500	25.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
				Sat.	Target					Sat.	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.4.4	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	80	250.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	80	250.000.000	
3.5	Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan	Orang	50	35.000.000	Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan	Orang	50	35.000.000	
3.5.1.	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	Orang	50	35.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	Orang	50	35.000.000	
4	Program Hubungan Industrial	Provinsi NTB	persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	%	21	2.390.000.000	Program Hubungan Industrial	Provinsi NTB	persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	%	21	2.390.000.000	
4.1	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	Perusahaan	80	150.000.000	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	Perusahaan	80	150.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
				Sat.	Target					Sat.	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.1.1	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	35	50.000.000	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	35	50.000.000	
4.1.2.	Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	Perusahaan	20	50.000.000	Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	Perusahaan	20	50.000.000	
4.1.3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjai [BID. HI]		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Perusahaan	75	50.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjai [BID. HI]		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Perusahaan	75	50.000.000	
4.2	Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	Perusahaan	80	235.000.000	Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	Perusahaan	80	235.000.000	
4.2.1	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di I (Satu) Daerah Provinsi [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	50	50.000.000	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di I (Satu) Daerah Provinsi [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	50	50.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
				Sat.	Target					Sat.	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.2.2	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	50	50.000.000	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	50	50.000.000	
4.2.3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	20	25.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	20	25.000.000	
4.2.4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	11	75.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	11	75.000.000	
4.2.5	Sub Kegiatan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusahaan	20	35.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusahaan	20	35.000.000	
4.3	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Provinsi NTB	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	Surat Keputusan	11	2.005.000.000	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Provinsi NTB	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	Surat Keputusan	11	2.005.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
				Sat.	Target					Sat.	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.3.1	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah Penetapan UMP	Surat Keputusan	1	75.000.000	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah Penetapan UMP	Surat Keputusan	1	75.000.000	
4.3.2	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah penetapan UMK	Surat Keputusan	10	30.000.000	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah penetapan UMK	Surat Keputusan	10	30.000.000	
4.3.3	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja[BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	12.000	1.900.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja[BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	12.000	1.900.000.000	
5	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Provinsi NTB	persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%	21	1.195.365.000	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Provinsi NTB	persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%	21	1.195.365.000	
5.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	Perusahaan	407	1.195.365.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	Perusahaan	407	1.195.365.000	
5.1.1.	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BPKPS]	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) Di Pulau Sumbawa	Perusahaan	150	150.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BPKPS]	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) Di Pulau Sumbawa	Perusahaan	150	150.000.000	
5.1.2.	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BPKPL]	P. Sumbawa	umlah Perusahaan yang Menerapkan NormaKetenagakerjaan di Perusahaan (TermasukPerusahaan yang Mempekerjakan TKA) Di Pulau Lombok	Perusahaan	75	100.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BPKPL]	P. Sumbawa	umlah Perusahaan yang Menerapkan NormaKetenagakerjaan di Perusahaan (TermasukPerusahaan yang Mempekerjakan TKA) Di Pulau Lombok	Perusahaan	75	100.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
				Sat.	Target					Sat.	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.3.	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BID. WAS]	P. Lombok	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus	24	75.000.000	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BID. WAS]	P. Lombok	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus	24	75.000.000	
5.1.4.	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BPKPL]	Provinsi NTB	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan Di Pulau Lombok	Kasus	24	75.000.000	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BPKPL]	Provinsi NTB	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan Di Pulau Lombok	Kasus	24	75.000.000	
5.1.5.	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BPKPS]	P. Sumbawa	Jumlah Perusahaan Yang diperiksa Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya Di Pulau Sumbawa	Kasus	24	75.000.000	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BPKPS]	P. Sumbawa	Jumlah Perusahaan Yang diperiksa Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya Di Pulau Sumbawa	Kasus	24	75.000.000	
5.1.6.	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BID. WAS]	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	35	102.648.000	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BID. WAS]	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	35	102.648.000	
5.1.7.	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BPKPS]	P. Sumbawa	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	25	67.717.000	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BPKPS]	P. Sumbawa	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	25	67.717.000	
5.1.8.	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BPKPL]	P. Lombok	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	50	550.000.000	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BPKPL]	P. Lombok	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	50	550.000.000	
6	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Provinsi NTB	persentase Kawasan Baru Transmigrasi	%	100	110.000.000	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Provinsi NTB	persentase Kawasan Baru Transmigrasi	%	100	110.000.000	
6.1	Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen NKSAD.	Dokumen	2	110.000.000	Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen NKSAD.	Dokumen	2	110.000.000	
6.1.1.	Sub Kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi [BID. TRANS]	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan	Dokumen	1	50.000.000	Sub Kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi [BID. TRANS]	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan	Dokumen	1	50.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
				Sat.	Target					Sat.	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Dikerjasamakan dengan Daerah Lain						Dikerjasamakan dengan Daerah Lain				
6.1.2	Sub Kegiatan Advokasi Dan Musyawarah Penetapan Kawasan [BID. TRANS]	Provinsi NTB	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi	2	75.000.000	Sub Kegiatan Advokasi Dan Musyawarah Penetapan Kawasan [BID. TRANS]	Provinsi NTB	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi	2	75.000.000	
6.1.3	Sub Kegiatan Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi [BID. TRANS]	Provinsi NTB	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen	1	35.000.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi [BID. TRANS]	Provinsi NTB	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen	1	35.000.000	
7	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Provinsi NTB	porsentase kawasan transmigrasi yang dibangun	%	100	357.500.000	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Provinsi NTB	porsentase kawasan transmigrasi yang dibangun	%	100	357.500.000	
7.1.	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah transmigran yang ditempatkan dalam	KK	15	357.500.000	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah transmigran yang ditempatkan dalam	KK	15	357.500.000	
7.1.1.	Sub Kegiatan Pemandahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	KK	15	75.000.000	Sub Kegiatan Pemandahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	KK	15	75.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
				Sat.	Target					Sat.	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.1.2	Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi	Provinsi NTB	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	KK	30	35.000.000	Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi	Provinsi NTB	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	KK	30	35.000.000	
7.1.3	Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Provinsi NTB	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Verifikasi Hasil Penjajakan	lokasi	2	35.000.000	Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Provinsi NTB	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Verifikasi Hasil Penjajakan	lokasi	2	35.000.000	
7.1.4	Pengangkutan dari Kabupaten/Kota ke Embarkasi	Provinsi NTB	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	KK	15	15.000.000	Pengangkutan dari Kabupaten/Kota ke Embarkasi	Provinsi NTB	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	KK	15	15.000.000	
7.1.5	Penampungan Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Provinsi Daerah Asal	KK	15	25.000.000	Penampungan Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Provinsi Daerah Asal	KK	15	25.000.000	
7.1.6	Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai Ke Lokasi	Provinsi NTB	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi	KK	15	35.000.000	Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai Ke Lokasi	Provinsi NTB	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi	KK	15	35.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
				Sat.	Target					Sat.	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.1.7	Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	Provinsi NTB	Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan kepada Transmigran	paket	15	37.500.000	Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	Provinsi NTB	Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan kepada Transmigran	paket	15	37.500.000	
7.1.8	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigras	Provinsi NTB	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	5	100.000.000	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigras	Provinsi NTB	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	5	100.000.000	
8	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Provinsi NTB	Cakupan kawasan transmigrasi yang dikembangkan	%	75	575.000.000	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Provinsi NTB	Cakupan kawasan transmigrasi yang dikembangkan	%	75	575.000.000	
8.1.	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Pemantapan	Provinsi NTB	Jumlah kawasan yang dibina	lokasi	2	575.000.000	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Pemantapan	Provinsi NTB	Jumlah kawasan yang dibina	lokasi	2	575.000.000	
8.1.1.	Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman [BID. TRANS]	Provinsi NTB	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	KK	25	75.000.000	Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman [BID. TRANS]	Provinsi NTB	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	KK	25	75.000.000	
8.1.2	Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi Dan Kelembagaan Dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman. [BID. TRANS]	Provinsi NTB	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman	2	500.000.000	Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi Dan Kelembagaan Dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman. [BID. TRANS]	Provinsi NTB	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman	2	500.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Tabel 2.8.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Proaram	Indikator	Lokasi	Target	Catatan
1	2	3	4	5
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kab./Kota yang menyusun RTK			
Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Perda ketenagakerjaan yang dihasilkan	Provinsi NTB	1 Dokumen	APBD Murni 2024
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi			
Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	Mataram, Lombok tengah, Lombok Timur	396 orang	APBD Murni 2024
Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK Yang Disurvei dan dinilai	10 Kabupaten/Kota	5 LPK	APBD Murni 2024
Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 Kabupaten/Kota	5 Perusahaan	APBD Murni 2024

Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Mataram	1 Dokumen	APBD Murni 2024
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.			
Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota	jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui AKAD/ AKL	Loteng, Lotim, KLU,Sumbawa, Sumbawa Barat, Bima Dompou	2800 orang	APBD Murni 2024
Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang diterbitkan	Loteng, Lotim, KLU,Sumbawa, Sumbawa Barat, Bima Dompou	35 Lembaga	APBD Murni 2024
Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	10 kab/Kota	2500 orang	APBD Murni 2024
Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	Jumlah PMI Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan.	10 kab/Kota	24.453 orang	APBD Murni 2024
Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan	10 kab/Kota	50 orang	APBD Murni 2024

(Satu)Daerah Provinsi				
Program Hubungan Industrial	persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial			
Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	10 kab/Kota	80 Perusahaan	APBD Murni 2024
Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	10 kab/Kota	80 Perusahaan	APBD Murni 2024
Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	10 kab/Kota	11 Surat Keputusan	APBD Murni 2024

Kabupaten/Kota (UMSK)				
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	porsentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3			
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	10 kab/Kota	407 perusahaa	APBD Murni 2024
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	persentase Kawasan Baru Transmigrasi			
Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen perencanaan	Kaltim, Sutra	2 Dokumen	APBD Murni 2024
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	porsentase kawasan transmigrasi yang dibangun			
Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah transmigran yang ditempatkan	Kaltim, Sutra	15 KK	APBD Murni 2024
Program Pengembangan	Cakupan kawasan transmigrasi yang			

Kawasan Transmigrasi	dikembangkan			
Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Pematangan	Jumlah kawasan yang dibina	<u>Tambora, labangka</u>	2 Lokasi	APBD Murni 2024

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 adalah:

- 1. Meningkatnya pemberdayaan dan pendayagunaan angkatan kerja** dengan indikator **Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)**.
- 2. Meningkatnya kemandirian transmigran** dengan indikator **Persentase Transmigran yang Sejahtera dan mandiri**.
- 3. Peningkatan penerimaan retribusi** dengan indikator **Persentase Peningkatan Penerimaan PAD**.

3.2. Sasaran

Adapun Sasaran Renja yaitu :

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Renstra Disnakertrans 2024-2026 pada **tujuan (1)** di atas memiliki sasaran 3 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pembangunan dengan indikator :
 - a) Persentase peningkatan penyediaan lapangan kerja melalui job fair
 - b) Persentase pencari kerja yang bersertifikat keahlian
2. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dengan indicator :
 - a) Persentase peningkatan upah kerja (UMP)
 - b) Persentase peningkatan remittance

Kemudian **tujuan (2)** memiliki sasaran yaitu meningkatnya pengembangan satuan permukiman transmigrasi dengan indikator Persentase satuan permukiman transmigrasi yang dikembangkan

Terakhir **tujuan (3)** memiliki sasaran yaitu meningkatnya penerimaan retribusi melalui pelayanan K3 dan Rencana Penggunaan TKA dengan indikator peningkatan penerimaan PAD pada kegiatan K3 dan RPTKA di Disnakertrans (retribusi)

*Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi*

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat .	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			Penjelasan
					2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya pemberdayaan dan pendayagunaan angkatan kerja		Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)	Poin	68,73	71,19	73,65	<p>Menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar, seperti Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Kompetensi Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, Kondisi Lingkungan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, serta Jaminan Sosial Tenaga Kerja</p> <p>Formula :</p> <p>Dihitung oleh kementerian ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan 9 indikator di atas</p> <p>Sumber Data : Kementerian Ketenagakerjaan RI</p>
		Meningkatnya Pemerataan Kesempatan kerja dan penyediaan Tenaga Kerja yang sesuai kebutuhan pembangunan	Persentase peningkatan penyediaan lapangan kerja melalui job fair	%	30,00	40,00	100,00	<p>Menggambarkan kondisi penyediaan lapangan kerja melalui yang dilakukan dengan job fair setiap tahun</p> <p>Formula :</p> $= \frac{\text{Jumlah Lapangan Kerja tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{Jumlah Lapangan Kerja Tahun } t - 1} \times 100 \%$ <p>Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Prov. NTB</p>
			Persentase Pencari Kerja yang bersifat	%	20,00	22,50	25,00	Menggambarkan kondisi angkatan kerja yang memiliki keahlian yang ditunjukkan dengan sertifikat keahlian

			Keahlian					<p>Formula :</p> $= \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja Bersertifikat Keahlian}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100 \%$ <p>Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Prov. NTB</p>
		Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan upah kerja (UMP)	%	5,00	5,00	5,00	<p>Menggambarkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) setiap tahun</p> <p>Formula :</p> $= \frac{\text{UMP tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{UMP Tahun } t - 1} \times 100 \%$ <p>Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Prov. NTB</p>
			Persentase peningkatan remittance	%	17,00	20,00	25,00	<p>Menggambarkan kenaikan remittance yang masuk ke wilayah NTB setiap tahun</p> <p>Formula :</p> $= \frac{\text{Remittance tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{Remittance Tahun } t - 1} \times 100 \%$ <p>Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Prov. NTB</p>
2.	Meningkatnya Kemandirian Transmigran		Persentase Transmigran yang Sejahtera dan mandiri	%	49,53	50,47	51,40	<p>Menggambarkan kondisi kesejahteraan transmigran</p> <p>Formula :</p> $= \frac{\text{Jumlah Transmigran Yang Telah Mandiri}}{\text{Jumlah Transmigran}} \times 100 \%$ <p>Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Prov. NTB</p>
		Meningkatnya pengembangan	Persentase satuan permukiman	%	25,00	27,00	29,00	<p>Menggambarkan kondisi pengembangan pemukiman transmigrasi</p>

		gan satuan permukiman transmigran	transmigran yang dikembangkan					Formula : $= \frac{\text{Jumlah pemukiman transmigrasi yang dikembangkan}}{\text{Jumlah pemukiman transmigrasi}}$ Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Prov. NTB
3.	Peningkatan Penerimaan Retribusi	Meningkatnya penerimaan Retribusi melalui pelayanan K3 dan Rencana Penggunaan TKA	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (retribusi)	%	7-10	10-15	> 15	Menggambarkan pertumbuhan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Dinas Tenaga Kerja (Retribusi) Formula : $= \frac{PAD \text{ tahun } t - (tahun \ t - 1)}{PAD \text{ Tahun } t - 1} \times 100 \%$ Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Prov. NTB

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Renstra Disnakertrans Prov NTB tahun 2024-2026 penyusunan program/ kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2021. Dalam mencapai tujuan perangkat daerah, Disnakertrans Prov. NTB didukung oleh 8 program prioritas antara lain : Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Program

Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Program Hubungan Industrial dan Program Pengawasan Ketenagakerjaan. Berikut Rencana Program dan Kegiatan, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1.
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan
Prakiraan Maju Tahun 2025

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
			2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip OPD	Indeks	81,00	29.078.641.688	83,00	29.999.005.857
			2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	23	348.000.000	23	382.800.000
			2.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (SKPD INDUK)	Jumlah dokumen	dokumen	1	110.000.000	1	121.000.000
			2.07.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen (INDUK)	dokumen	1	20.000.000	1	22.000.000
		Jumlah dokumen (UPTD BLK DLN)			dokumen	1	8.000.000	1	8.800.000	
		Jumlah dokumen (UPTD BPKK3 P. LOMBOK)			dokumen	1	5.000.000	1	5.500.000	
		Jumlah dokumen (UPTD BPKK3 P.			dokumen		5.000.000		5.500.000	

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
			2.07.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen (INDUK)	dokumen	1	20.000.000	1	22.000.000
					Jumlah dokumen (UPTD BLK DLN)	dokumen	1	8.000.000	1	8.800.000
					Jumlah dokumen (UPTD BPKK3 P. LOMBOK)	dokumen	1	5.000.000	1	5.500.000
					Jumlah dokumen (UPTD BPKK3 P. SUMBAWA)	dokumen	1	5.000.000	1	5.500.000
			2.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen (INDUK)	dokumen	1	10.000.000	1	11.000.000
					Jumlah dokumen (UPTD BLK DLN)	dokumen	1	5.000.000	1	5.500.000
					Jumlah dokumen (UPTD BPKK3 P. LOMBOK)	dokumen	1	3.000.000	1	3.300.000
					Jumlah dokumen (UPTD BPKK3 P. SUMBAWA)	dokumen	1	3.000.000	1	3.300.000
			2.07.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	Jumlah dokumen (INDUK)	dokumen	1	10.000.000	1	11.000.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
				DPASKPD	Jumlah dokumen (UPTD BLK DLN)	dokumen	1	5.000.000	1	5.500.000
					Jumlah dokumen (UPTD BPKK3 P. LOMBOK)	dokumen	1	3.000.000	1	3.300.000
					Jumlah dokumen (UPTD BPKK3 P. SUMBAWA)	dokumen	1	3.000.000	1	3.300.000
			2.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	dokumen	5	20.000.000	5	22.000.000
			2.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	dokumen	1	100.000.000	1	110.000.000
			2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan	dokumen	9	17.511.389.398	9	19.262.528.338
			2.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	128	17.307.219.398	128	19.037.941.338
			2.07.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Induk)	Orang	2	106.670.000	2	117.337.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
			2.07.01.1.02.04	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Laporan (Induk)	Dokumen	2	25.000.000	2	27.500.000
					Jumlah Laporan (BLK DLN)	Dokumen	1	20.000.000	1	22.000.000
					Jumlah Laporan (BPKPL)	Dokumen	1	15.000.000	1	16.500.000
					Jumlah Laporan (BPKPS)	Dokumen	1	15.000.000	1	16.500.000
			2.07.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan (Induk)	Dokumen	1	10.000.000	1	11.000.000
					Jumlah Laporan (BLK DLN)	Dokumen	1	7.500.000	1	8.250.000
					Jumlah Laporan (BPKPL)	Dokumen	1	5.000.000	1	5.500.000
					Jumlah Laporan (BPKPS)	Dokumen	1	5.000.000		5.500.000
			2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Barang Milik Daerah	dokumen	4	48.000.000	4	52.800.000
			2.07.01.1.03.06	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD (Induk)	Laporan	1	12.000.000	1	13.200.000
					Jumlah BMD (BLK)	Laporan	1	12.000.000	1	13.200.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
					DLN)					
					Jumlah BMD (BPKPL)	Laporan	1	12.000.000	1	13.200.000
					Jumlah BMD (BPKPS)	Laporan	1	12.000.000	1	13.200.000
			2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelatihan	orang	157	489.918.000	157	363.909.800
			2.07.01.1.05.05	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah ASN yang di diklat Formal (Induk)	Orang	128	50.000.000	128	55.000.000
			2.07.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang di diklat Formal (BLK DLN)	Orang	5	35.000.000	5	38.500.000
		Jumlah ASN yang di diklat Formal (BPKPL)			Orang	9	154.918.000	9	170.409.800	
		Jumlah ASN yang di diklat Formal (BPKPS)			Orang	15	250.000.000	15	100.000.000	
			2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	dokumen	28	4.187.000.000	28	3.505.700.000
			2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Instalasi	Jenis		8.000.000		8.800.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
				Bangunan Kantor	Listrik (Induk)		11		11	
					Jumlah Instalasi Listrik (BLK DLN)	Jenis	25	5.000.000	25	5.500.000
					Jumlah Instalasi Listrik BPKPL)	Jenis	5	3.500.000	5	3.850.000
					Jumlah Instalasi Listrik BPKPS)	Jenis	5	3.500.000	5	3.850.000
					Jumlah peralatan kantor (Induk)	Jenis	8	125.000.000	8	137.500.000
			2.07.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor (BLK DLN)	Jenis	6	75.000.000	6	82.500.000
					Jumlah peralatan kantor (BPKPL)	Jenis	12	2.000.000.000	8	1.500.000.000
					Jumlah peralatan kantor (BPKPS)	Jenis	9	1.500.000.000	7	1.250.000.000
					Jumlah Jenis ATK (Induk)	Jenis	30	25.000.000	30	27.500.000
			2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK (BLK DLN)	Jenis	15	17.000.000	15	18.700.000
					Jumlah Jenis ATK (BPKPL)	Jenis	10	12.500.000	10	13.750.000
					Jumlah Jenis ATK	Jenis		12.500.000		13.750.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
			2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan (Induk)	Eksemplar	7	8.000.000	7	8.800.000
		Jumlah Cetak dan Penggandaan (BLK DLN)			Eksemplar	5	5.000.000	5	5.500.000	
		Jumlah Cetak dan Penggandaan (BPKPL)			Eksampler	1	3.500.000	1	3.850.000	
		Jumlah Cetak dan Penggandaan (BPKPS)			Eksampler	3	3.500.000	3	3.850.000	
			2.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar (Induk)	Eksemplar	7	15.000.000	7	16.500.000
		Jumlah eksemplar (BLK DLN)			Eksemplar	6	10.000.000	6	11.000.000	
		Jumlah eksemplar (BPKPL)			Eksemplar	6	7.500.000	6	8.250.000	
		Jumlah eksemplar (BPKPS)			Eksemplar	1	7.500.000	1	8.250.000	
			2.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Orang (Induk)	Orang	300	30.000.000	300	33.000.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
					Jumlah Orang (BLK DLN)	Orang	200	15.000.000	200	16.500.000
					Jumlah Orang BPKPL	Orang	150	10.000.000	150	11.000.000
					Jumlah Orang (BPKPS)	Orang	150	10.000.000	150	11.000.000
			2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat (Induk)	Orang/tahun	15	100.000.000	15	110.000.000
					Jumlah Rapat (BLK DLN)	Orang/tahun	10	50.000.000	10	55.000.000
					Jumlah Rapat (BPKPL)	Orang/tahun	10	50.000.000	10	55.000.000
					Jumlah Rapat (BPKPS)	Orang/tahun	10	75.000.000	10	82.500.000
			2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah sarana dan prasarana kantor	Unit	7	1.800.000.000	7	1.600.000.000
			2.07.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan (Induk)	Unit	2	800.000.000	2	600.000.000
					Jumlah Kendaraan (BLK DLN)	Unit	1	300.000.000	1	300.000.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
				Jumlah Kendaraan (BPK3PS)	Unit	2	350.000.000	2	350.000.000	
			2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	orang	84	3.185.334.290	84	3.503.867.719
			2.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar (Induk)	Surat	139	2.500.000	139	2.750.000
					Jumlah Surat Keluar (BLK DLN)	Surat	146	1.600.000	146	1.760.000
					Jumlah Surat Keluar (BPKPL)	Surat	115	2.134.290	115	2.347.719
					Jumlah Surat Keluar (BPKPS)	Surat	96	2.500.000	96	2.750.000
			2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening (Induk)	Rekening	4	300.000.000	4	330.000.000
					Jumlah Rekening (BLK DLN)	Rekening	6	111.600.000	6	122.760.000
					Jumlah Rekening (BPKPL)	Rekening	3	50.000.000	3	55.000.000
					Jumlah Rekening (BPKPS)	Rekening	3	45.000.000	3	49.500.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
			2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa pelayanan Umum Kantor (Induk)	Orang	45	1.556.755.600	45	1.650.000.000
					Jumlah Tenaga Jasa pelayanan Umum Kantor (BLK DLN)	Orang	15	450.000.000	15	495.000.000
					Jumlah Tenaga Jasa pelayanan Umum Kantor (BPKPL)	Orang	13	390.000.000	13	429.000.000
					Jumlah Tenaga Jasa pelayanan Umum Kantor (BPKPS)	Orang	11	330.000.000	11	363.000.000
			2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit	72	1.509.000.000	74	1.327.400.000
			2.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan (Induk)	Unit	11	225.000.000	12	247.500.000
					Jumlah Kendaraan (BLK DLN)	Unit	5	90.000.000	7	99.000.000
					Jumlah Kendaraan (BPKL)	Unit	4	72.000.000	3	79.200.000
					Jumlah Kendaraan (BPKPS)	Unit	4	72.000.000	4	79.200.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
			2.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor (Induk)	Gedung	1	150.000.000	1	165.000.000
					Jumlah Gedung kantor (BLK DLN)	Gedung	1	100.000.000	1	100.000.000
					Jumlah Gedung kantor (BPKPL)	Gedung	1	200.000.000	1	200.000.000
					Jumlah Gedung kantor (BPKPS)	Gedung	1	500.000.000	1	250.000.000
			2.07.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (Induk)	Jenis	25	45.000.000	25	49.500.000
					Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (BLK DLN)	Jenis	10	25.000.000	10	25.000.000
					Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (BPKPL)	Jenis	5	15.000.000	5	16.500.000
					Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (BPKPS)	Jenis	5	15.000.000	5	16.500.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
							Meningkatnya pemberdayaan dan pendayagunaan angkatan kerja		Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)	
			2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Porsentase kab/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	100	235.000.000	100	258.500.000
			2.07.02.1.01	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokjumen Rencana Tenaga Kerja yang di hasilkan	dokumen	2	235.000.000	2	258.500.000
			2.07.02.1.01.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	10	150.000.000	10	165.000.000
			2.07.02.1.01.02	Sub. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	Orang	50	85.000.000	50	93.500.000
			2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.	%	43,30	550.000.000	49,48	550.000.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
										2.07.04.1.01
			2.07.04.1.01.02	Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja [BID. PENEMPATAN]	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Orang	2500	50.000.000	2500	50.000.000
			2.07.04.1.01.03	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja [BID. PENEMPATAN]	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	100	100.000.000	100	100.000.000
			2.07.04.1.01.04	Sub Kegiatan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah Dan AKL Antar Kerja Lokal) [BID. PENEMPATAN]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Orang	100	100.000.000	100	100.000.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
										2.07.04.1.01.05
		Persentase pencari yang bersertifikat keahlian				%	20,00	1.343.000.000	22,50	1.580.000.000
			2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%	20,00	1.343.000.000	22,50	1.580.000.000
			2.07.03.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	Orang	396	1.213.000.000	453	1.425.000.000
			2.07.03.1.01.01	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [BID. LATTAS]	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	300	250.000.000	325	275.000.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
			2.07.03.1.01.01	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [BLK]	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	96	535.000.000	128	700.000.000
			2.07.03.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga Dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana Dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja [BID. LATTAS]	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	lembaga	10	300.000.000	10	300.000.000
			2.07.03.1.01.03	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	11	128.000.000	8	150.000.000
			2.07.03.1.02	Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK Yang Disurvei dan dinilai	LPK	5	50.000.000	7	75.000.000
			2.07.03.1.02.01	Sub Kegiatan Survei Dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja [BID. LATTAS].	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	LPK	5	50.000.000	7	75.000.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
										2.07.03.1.03
			2.07.03.1.03.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	5	45.000.000	5	45.000.000
			2.07.03.1.04	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	1	35.000.000	1	35.000.000
			2.07.03.1.04.01	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	1	35.000.000	1	35.000.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
									Persentase peningkatan penyediaan lapangan kerja melalui job fair	
			2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.	%	43,30	200.000.000	49,48	215.000.000
			2.07.04.1.03	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	Orang	1.000	200.000.000	1.250	215.000.000
			2.07.04.1.03.01	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi InformasiPasar Kerja Online [BID. PENEMPATAN]	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000
			2.07.04.1.03.02	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online [BID. PENEMPATAN]	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	5.000	25.000.000	5.000	25.000.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
										2.07.04.1.03.03
	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan upah kerja (UMP)				%	5,00	2.390.000.000	5,00	2.553.500.000
			2.07.05	Program Hubungan Industrial	persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	%	21	2.390.000.000	22	2.553.500.000
			2.07.05.1.01	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1	Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	Perusahaan	80	150.000.000	90	150.000.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
			2.07.05.1.01.01	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial [BID. HI]	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	perusahaan	35	50.000.000	35	50.000.000
			2.07.05.1.01.02	Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial [BID. HI]	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	perusahaan	20	50.000.000	20	50.000.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
										2.07.05.1.01.03
			2.07.05.1.02	Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	Perusahaan	80	235.000.000	90	248.500.000
			2.07.05.1.02.01	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di I (Satu) Daerah Provinsi [BID. HI]	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	perkara	50	50.000.000	50	50.000.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
			2.07.05.1.02.02	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi [BID. HI]	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	perkara	50	50.000.000	50	50.000.000
			2.07.05.1.02.03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi [BID. HI]	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	20	25.000.000	25	27.500.000
			2.07.05.1.02.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi [BID. HI]	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	11	75.000.000	11	82.500.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
										2.07.05.1.02.05
			2.07.05.1.03	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	Surat Keputusan	11	2.005.000.000	11	2.155.000.000
			2.07.05.1.03.01	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) [BID. HI]	Jumlah Penetapan UMP	Surat Keputusan	1	75.000.000	1	75.000.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
			2.07.05.1.03.03	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) [BID. HI]	Jumlah penetapan UMK	Surat Keputusan	10	30.000.000	10	30.000.000
			2.07.05.1.03.05	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja[BID. HI]	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	12.000	1.900.000.000	13.000	2.050.000.000
			2.07.06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	porsentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%	21	1.195.365.000	22	1.216.502.014

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
										2.07.06.1.01
			2.07.06.1.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BPKPS]	umlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) Di Pulau Sumbawa	Perusahaan	75	100.000.000	75	100.000.000
			2.07.06.1.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BPKPL]	umlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) Di Pulau Lombok	Perusahaan	150	150.000.000	150	150.000.000
			2.07.06.1.01.02	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BID. WAS]	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus	24	75.000.000	24	75.000.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
			2.07.06.1.01.02	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BPKPL]	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan Di Pulau Lombok	Kasus	24	75.000.000	24	75.000.000
			2.07.06.1.01.02	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BPKPS]	Jumlah Perusahaan Yang diperiksa Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya Di Pulau Sumbawa	Kasus	24	75.000.000	24	75.000.000
			2.07.06.1.01.03	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BID. WAS]	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	35	102.648.000	40	115.383.434
			2.07.06.1.01.03	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BPKPS]	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	25	67.717.000	30	76.118.580

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
										2.07.06.1.01.03
		Persentase peningkatan remittance				%	17,00	625.000.000	20,00	662.500.000
			2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.	%	43,30	625.000.000	49,48	662.500.000
			2.07.04.1.04	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	Jumlah PMI Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan.	Orang	24.453	575.000.000	25.953	607.500.000
			2.07.04.1.04.01	Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan Dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia [BID. PENEMPATAN]	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	250	250.000.000	300	275.000.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
			2.07.04.1.04.02	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronika [BID. PENEMPATAN]	Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	Perusahaan	25	50.000.000	25	55.000.000
			2.07.04.1.04.03	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran [BID. PENEMPATAN]	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	Orang	21.500	25.000.000	25.000	27.500.000
			2.07.04.1.04.04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan [BID. PENEMPATAN]	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	80	250.000.000	80	250.000.000
			2.07.04.1.02	Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang diterbitkan	lembaga	35	50.000.000	40	55.000.000
			2.07.04.1.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS [BID. PENEMPATAN]	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang	lembaga	35	50.000.000	40	55.000.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
	Meningkatkan kemandirian transmigran	Persentase transmigran yang sejahtera dan mandiri					49,53	725.000.000	50,47	725.000.000
			3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Cakupan kawasan transmigrasi yang dikembangkan	%	100	725.000.000	100	725.000.000
			3.32.04.1.01	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Pemantapan	Jumlah kawasan yang dibina	lokasi	2	725.000.000	2	725.000.000
			3.32.04.1.01.02	Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman [BID. TRANS]	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	KK	30	225.000.000	30	225.000.000
			3.32.04.1.01.02	Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi Dan Kelembagaan Dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman. [BID.	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial,	Satuan Permukiman	2	500.000.000	2	500.000.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
Peningkatan penerimaan retribusi		Persentase peningkatan penerimaan retribusi				%	7-10	200.000.000	10-15	235.000.000
	Meningkatnya penerimaan retribusi melalui pelayanan K3 dan Rencana Penggunaan TKA	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada kegiatan K3 dan RPTKA di Disnakertrans (retribusi)				%	7-10	200.000.000	10-15	235.000.000
			2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.	%	43,30	50.000.000	49,48	55.000.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
			2.07.04.1.06	Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu)Daerah Provinsi	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan	Orang	50	50.000.000	75	55.000.000
			2.07.04.1.06.01	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [BID. PENEMPATAN]	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	Orang	50	50.000.000	75	55.000.000
			2.07.06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	porcentage perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%	21	150.000.000	22	180.000.000
			2.07.06.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	Perusahaan	150	150.000.000	200	180.000.000
			2.07.06.1.01.03	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BPKPS]	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	50	50.000.000	75	60.000.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
										2.07.06.1.01.03
	Meningkatnya pengembangan satuan permukiman transmigrasi	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang dikembangkan				%	78,26	517.500.000	80,43	532.500.000
			3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	persentase Kawasan Baru Transmigrasi	%	100	160.000.000	100	160.000.000
			3.32.02.1.01	Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen perencanaan	Dokumen	2	160.000.000	2	160.000.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
			3.32.02.1.01.01	Sub Kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi [BID. TRANS]	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000
			3.32.02.1.01.02	Sub Kegiatan Advokasi Dan Musyawarah Penetapan Kawasan [BID. TRANS]	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi	2	75.000.000	2	75.000.000
			3.32.02.1.01.03	Sub Kegiatan Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi [BID. TRANS]	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen	1	35.000.000	1	35.000.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
										3.32.02
			3.32.02.1.01	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK	15	357.500.000	15	372.500.000
			3.32.02.1.04	Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	KK	15	75.000.000	15	75.000.000
			3.32.02.1.05	Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	KK	30	35.000.000	45	50.000.000
			3.32.02.1.08	Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang	lokasi	2	35.000.000	2	35.000.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2024		Perkiraan Maju 2025	
							Target	Rp.	Target	Rp.
			3.32.02.1.11	Pengangkutan dari Kabupaten/Kota ke Embarkasi	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	KK	15	15.000.000	15	15.000.000
			3.32.02.1.12	Penampungan Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Provinsi Daerah Asal	KK	15	25.000.000	15	25.000.000
			3.32.02.1.16	Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai Ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi	KK	15	35.000.000	15	35.000.000
			3.32.02.1.14	Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan kepada Transmigran	paket	15	37.500.000	15	37.500.000
			3.32.02.1.15	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigras	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	5	100.000.000	5	100.000.000
								35.864.141.688		37.311.005.857

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Disnakertrans Prov. NTB ini merupakan tindak lanjut dari perubahan Renstra Disnakertrans Prov. NTB (2024-2026). Hal tersebut mutlak dilakukan guna menghadapi tantangan dan permasalahan yang berkembang dalam pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di NTB.

Tujuan utama dari Penyusunan Renja Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2024 adalah sebagai dokumen acuan tahunan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan. Beberapa isu-isu strategis kedepan memastikan adanya Link and Macth ketenagakerjaan, meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja serta pengembangan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 ini disusun untuk dijadikan pedoman bersama bagi seluruh aparat pada semua unit organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan lembaga terkait dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Ketenagakerjaan dan atau ketransmigrasian, guna pencapaian sasaran yang lebih efisien, efektif dan berkualitas.